

Covered interest arbitrage dan capital flow di Indonesia tahun 2002-2007

Rakendro Wijayanto, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=116314&lokasi=lokal>

Abstrak

Dewasa ini, investor memiliki beraneka ragam pilihan untuk melakukan investasi sesuai dengan keinginan maupun kebutuhannya. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko di dalam investasi adalah melakukan covered interest arbitrage. Dalam karya akhir ini, akan diteliti apakah ada peluang untuk melakukan covered interest arbitrage dan apakah faktor-faktor yang diperhitungkan di dalam covered interest arbitrage mempengaruhi capital flow di Indonesia selama tahun 2002 sampai 2007. Hasil penelitian tersebut diharapkan dapat digunakan oleh para investor sebagai indikator untuk melakukan penanaman uangnya di dalam negeri atau di luar negeri. Selain itu, dapat pula digunakan oleh pemerintah dan otoritas moneter sebagai salah satu cara untuk memantau capital flow. Hasil perhitungan covered interest parity selama kurun waktu 1998 sampai 2007 menunjukkan adanya peluang menanamkan dana di luar negeri dengan melakukan covered interest arbitrage. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut serta pengamatan atas pergerakan tingkat bunga dalam dan luar negeri (JIBOR dan federal fund rate) dan pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS spot dan forward, menunjukkan bahwa perbedaan JIBOR yang cukup tinggi di atas federal fund rate tidak membenarkan iklim yang kondusif untuk menarik dana dari investor luar negeri ke Indonesia selama nilai tukar rupiah terhadap dollar AS masih mengalami depresiasi yang cukup besar. Pada kurun waktu 1998 sampai 2007 menanamkan dana di luar negeri lebih menarik daripada menanamkan dana di dalam negeri. Keputusan para investor asing untuk melakukan penanaman dana di Indonesia dan investor dalam negeri untuk menanamkan dananya ke luar negeri pada dasarnya atas pertimbangan keuntungan, tanpa memperhatikan apakah investasi tersebut merupakan aliran dana ke dalam negeri atau ke luar negeri. Namun bagi Pemerintah capital flow baik ke luar maupun ke dalam negeri perlu dicermati perkembangannya agar dapat diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di dalam negeri dengan tetap mempertahankan kestabilan moneter. Berdasarkan hasil pengujian, capital inflow ke Indonesia secara signifikan dipengaruhi oleh suku bunga luar negeri (fed fund rate) dan forward premium/discount, sedangkan suku bunga dalam negeri (JIBOR) tidak signifikan. Sementara itu, capital outflow dari Indonesia secara signifikan hanya dipengaruhi oleh suku bunga luar negeri (fed fund rate), sedangkan suku bunga dalam negeri (JIBOR) dan forward premium/discount tidak signifikan. Secara gabungan, net capital inflow ke Indonesia, yang merupakan capital inflow dikurangi capital outflow, secara signifikan dipengaruhi oleh suku bunga luar negeri (fed fund rate) dan forward premium/discount, sedangkan suku bunga dalam negeri (JIBOR) tidak signifikan. Hal ini mengindikasikan beratnya tugas Pemerintah untuk mempengaruhi aliran dana ke luar/masuk Indonesia agar tidak menimbulkan dampak negatif di dalam negeri. Pemerintah tidak mungkin mempengaruhi atau mengendalikan suku bunga luar negeri. Keadaan ini menempatkan Indonesia sebagai negara yang sangat dipengaruhi oleh kebijakan negara lain (Amerika Serikat). Kebijakan Amerika di dalam menentukan suku bunganya perlu senantiasa dicermati agar tidak menimbulkan dampak buruk terhadap perekonomian Indonesia. Bank Indonesia sebagai Otoritas Moneter telah melaksanakan langkah kebijakan yang baik dengan menurunkan tingkat bunga SB! beberapa kali secara bertahap. Penurunan

tingkat bunga SBI tersebut telah diikuti oleh penurunan JIBOR, suku bunga deposito dan suku bunga kredit. Penurunan tingkat suku bunga di dalam negeri tersebut diharapkan dapat mendorong kegiatan usaha di dalam negeri yang pada gilirannya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di dalam negeri. Namun suku bunga bukan merupakan satu-satunya faktor yang dapat mendorong perekonomian, kebijakan Pemerintah di bidang lainnya seperti di bidang fiskal, di bidang ketenagakerjaan, dan di sektor lain juga berperan untuk mendorong kegiatan ekonomi di dalam negeri. Pemerintah harus dapat mengkoordinasikan semua kebijakan di berbagai bidang agar langkah-langkah yang diambil dapat memberikan hasil sesuai dengan yang diinginkan.